

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya negara tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa ada dukungan dari negara lain. Seperti yang dinyatakan *Marshall* (2015) bahwa negara yang tidak membutuhkan negara lain mengakibatkan negara tersebut menjadi rentan, lemah, dan bahkan mengalami kehancuran. Kebutuhan akan menjalin hubungan dengan negara lain menjadi landasan negara-negara didunia melakukan kerja sama.

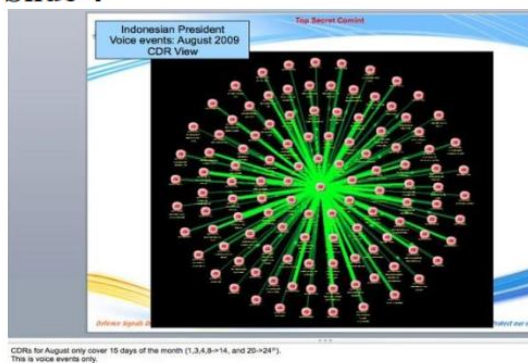
Perspektif Indonesia dalam melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain berpedoman pada prinsip saling menguntungkan, di mana kerja sama yang dilakukan mampu mencapai kepentingan nasional Indonesia (*Haryanto*, 2014). Terhadap negara yang berbatasan wilayah langsung dengan Indonesia, kerja sama dianggap penting sebagai bentuk solidaritas perkawanan. Kerja sama itu meliputi bidang ekonomi perdagangan, budaya, pendidikan, dan militer. Akan tetapi, dalam dinamika yang terjadi, Indonesia selalu mengalami hubungan yang naik turun dengan negara perbatasan tersebut, khususnya Australia.

Australia bukanlah kawan baru yang mempunyai hubungan dengan Indonesia. Hubungan tersebut sudah terjalin sejak lama. Indonesia pernah mendapatkan pengalaman buruk dengan Australia pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Tidak hanya itu, kasus lain seperti masalah pengungsi, kapal ikan, dan penyadapan menjadi isu yang sangat panas untuk diperbincangkan antara kedua negara (*Prabanigtyas*, 2017). Empat tahun yang lalu, hubungan Indonesia-Australia kembali memanas akibat isu penyadapan yang dilakukan oleh badan intelijen Australia kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013. Penyadapan tersebut telah dilakukan oleh Australia sejak tahun 2009 melalui kantor kedutaan Australia di Jakarta (*Pasulina*, 2015). Bukti adanya penyadapan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, sebagaimana dilansir BBC (20/11/2013), Australia telah melakukan tindakan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007—2009 (Nugroho, 2013). Tindakan tersebut memicu pemerintah Indonesia kembali mengubah dan mengevaluasi semua kerja sama dengan Australia. Akibat permasalahan tersebut hubungan kerja sama militer Indonesia-Australia juga ikut pasang surut. Buruknya kerja sama militer Indonesia ini ditandai dengan beberapa kerja sama dan agenda kegiatan militer yang sudah berlangsung sejak lama kembali harus dihentikan

Gambar 1.1 Dokumen Penyadapan Australia “Leaked DSD slides: Australia’s Attempts to spy on Indonesian President”

Slide 4



Slide 5



Sumber: ABC News (Brissenden, 2013)

Berdasarkan review Buku Putih Pertahanan Australia yang dilakukan *Laksmana* (2016), Australia melihat Indonesia bukanlah sebagai ancaman, melainkan sebagai partner dalam membantu melakukan penanganan masalah keamanan di kawasan—seperti: masalah terorisme, *transnational crime*, dan lainnya. Hubungan Australia dengan Indonesia mengandung arti yang sangat penting. Australia memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi besar dunia dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara sehingga mempunyai pengaruh yang besar di masa yang akan datang. Lebih dari itu, budget pertahanan Indonesia diprediksi tinggi pula. Hal inilah yang menjadi kewaspadaan Australia terhadap Indonesia (*Australia Defence White Paper*, 2016).

Di sisi lain, Indonesia memandang Australia sebagai negara yang memiliki kepentingan nasional yang sama salah satunya adalah kepentingan maritim (*Ikrar, 1996*). Kepentingan ini meliputi keamanan terhadap kejahatan transnasional, seperti: terorisme, penyelundupan senjata, imigrasi ilegal, perdagangan manusia, peredaran obat-obatan terlarang, serta masalah-masalah keamanan lainnya, yang menggunakan dimensi laut sebagai medan operasinya. Hal ini senada dengan program unggulan presiden Jokowi menjadi poros maritime dunia.

Melihat posisi Indonesia tersebut, Australia terus melakukan kerja sama dengan Indonesia. Melihat kembali kepada sejarah, Indonesia memiliki masa keemasan menjalin hubungan baik dengan Australia pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dan Presiden Suharto. Hal ini ditandai dengan dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia atas Belanda dengan menjadi mediator perjanjian Indonesia-Belanda. Selain itu, di masa pemerintahan Presiden Suharto ditandatangani *Agreement on Maintaining Security (AMS)* dengan Perdana Menteri Australia Paul Keating (*Abdulgani, 2010*). Oleh karena itu, hubungan Indonesia dan Australia memang sudah terjalin dengan baik sejak lama.

Lebih dari itu, hubungan antara Indonesia dan Australia terbilang baik dalam berbagai bidang, terutama pertahanan dan keamanan. Meskipun demikian, tidak selamanya hubungan tersebut selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam urusan militer, sejarah mencatat bahwa hubungan Indonesia-Australia sempat memburuk pascareferendum Timor Timur. Waktu itu Indonesia menilai adanya eksploitasi dan intervensi Australia terhadap masalah Timor Timur sehingga memojokkan Pemerintah Indonesia dalam membangun opini internasional. Hal ini terlihat saat Australia memimpin Pasukan Perdamaian PBB di Timor Timur pascareferendum Timor Timur. Disamping itu, Australia juga memiliki hubungan dekat dengan Timor Timur yang ditandai dengan kerja sama bilateral antara Australia dan Timor Timur untuk lepas dari Indonesia karena beberapa kepentingan (*Strating, 2014*).

Perlahan kepercayaan yang telah dibangun lama tersebut memudar akibat tindakan Australia yang selalu mengusik kedaulatan Indonesia. Data yang diperoleh bersumber Tempo (27/03/2017), pada tahun 2002 menyebutkan bahwa Australia memberikan puluhan visa menetap kepada warga negara Papua yang diduga sebagai anggota separatis Papua (Yohanes, 2017). Hal ini memperparah hubungan Indonesia-Australia pasca-1999.

Hubungan Indonesia dan Australia memang sangat dinamis. Kedua negara kembali mengalami hubungan buruk setelah terbongkarnya tindakan penyadapan komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa pejabat tinggi Indonesia pada tahun 2009. Penyelesaian masalah penyadapan antara Indonesia dan Australia memang mengalami banyak kendala akibat kedua negara saling mempertahankan opininya. Penyelesaian tersebut dapat tercapai setelah kedua negara menyetujui *Code of Conduct* tentang penyadapan.

Pascakasus penyadapan memang mengembalikan hubungan baik Indonesia dan Australia. Masalah Tidak berhenti dari situ. Hubungan Indonesia-Australia kembali mengalami gesekan akibat kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB) yang berdampak banyaknya *illegal migrant* yang masuk ke Australia berbelok ke Indonesia. Tidak cukup dengan itu, masalah juga kembali memburuk setelah tepidana kasus narkoba asal Australia yang dieksekusi mati pada tahun 2015, dan yang terakhir adalah masalah pelecehan lambang negara di kesatuan pendidikan militer Australia (Lestari, 2016).

Naik dan turun hubungan antara Indonesia dan Australia memberikan dampak yang cukup besar terhadap hubungan kerjasama yang sudah lama dibangun. Lebih dari itu, beberapa kerjasama militer Indonesia dan Australia juga mengalami dampak akibat masalah yang terjadi sehingga harus dilakukan beberapa evaluasi terhadap kerjasama militer baik TNI AD, AU, dan AL.

Gambar 1.2 Pasang surut hubungan Indonesia-Australia



Sumber: *Lestari* (2016)

Hubungan yang naik turun tersebut bukan berarti tidak memiliki dampak buruk. Sebagai negara yang memiliki hubungan kerja sama bilateral, Indonesia-Australia saling membutuhkan sama lain. Australia membutuhkan Indonesia sebagai pasar terbesar ekspor Sapi mereka sedangkan Indonesia mendapatkan keuntungan dari kunjungan pariwisata Australia (*Istiqomah*, 2014). Pembekuan kerja sama baik ekonomi dan militer memberikan efek bagi Australia untuk mengoreksi tindakan mereka terhadap Indonesia.

Dampak dari penyadapan bukan saja mengganggu hubungan bilateral kedua negara, akan tetapi mengganggu diplomasi pertahanan Indonesia-Australia yang sudah dibangun sejak lama. Pada kasus penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (ASIO) terhadap presiden SBY, Indonesia mengambil kebijakan untuk menghentikan semua

kerja sama militer seperti patroli laut bersama, latihan bersama, pertukaran perwira, dan pengajar militer (*Ruslan, 2013*). Krisis kepercayaan tersebut timbul akibat keamanan dan kepentingan Indonesia yang merasa terancam. Selama ini kerja sama pertahanan Indonesia-Australia juga meliputi kerja sama pertukaran informasi intelijen sehingga tindakan penyadapan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Australia terhadap Indonesia. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tindakan penyadapan merupakan tindakan pencurian informasi yang melanggar UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila Indonesia merasa dirugikan dengan tindakan penyadapan ini.

Kementerian Pertahanan sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap urusan pertahanan memiliki fungsi sebagai penjematan hubungan Indonesia-Australia. Kementerian Pertahanan memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan departemen pertahanan luar negeri negara lain dalam membangun kerja sama pertahanan (*Reveron, 2010*). Melihat melalui kaca mata kerja sama pertahanan, Indonesia bersama Australia telah menandatangani beberapa kerja sama keamanan, sebagaimana ditulis dalam Buku Putih Pertahanan Australia 2016, meliputi: Kerangka Lombok Treaty 2006, penyusunan kerja sama pertahanan, dan *Joint Understanding on Intelligent Cooperation* tahun 2014. Kerja sama tersebut meliputi *2 + 2 Ministerial Talks*, pertemuan panglima, *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue*, *Army to Army Talks*, *Navy to Navy Talks*, dan *Airman to Airman Talks*.

Hubungan yang selalu naik dan turun tersebut bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan oleh kedua negara. Terdapat beberapa upaya perbaikan hubungan yang dilakukan Indonesia dan Australia, seperti pertemuan kepala negara melalui perwakilan negara, terutama oleh Kementerian Pertahanan dalam urusan militer, komunikasi antar pemimpin negara, dan pertimbangan lainnya. Keikutsertaan lembaga militer dalam memperbaiki hubungan pascakasus penyadapan menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama menganggap hubungan kedua negara sangatlah penting ditengah permasalahan yang ada. Gap permasalahan penelitian ini adalah melihat hubungan Indonesia dan Australia yang mengalami naik dan turun pascakasus penyadapan sehingga bagaimana dampaknya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia-Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Terbongkarnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pemimpin Indonesia memberikan dampak negatif terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Respon Indonesia sangatlah tegas dalam memprotes tindakan penyadapan tersebut. Salah satu dampaknya adalah menurunnya hubungan kerja sama militer. Akibatnya, kerja sama militer dihentikan dalam waktu yang tidak ditentukan hingga membaiknya hubungan kedua negara.

Hubungan Indonesia dengan Australia perlahan mulai membaik setelah ditandatanganinya *Code of Conduct (COC) on Framework for Security Cooperation*, Akan tetapi tidak berselang lama, hubungan itu kembali menurun seperti protesnya Australia terhadap hukuman mati warga Negara Australia dan kasus pelecehan terhadap lambang Negara RI. Dinamika hubungan Indonesia dan Australia memang sangat unik, di sinilah, akan dilakukan analisis peran diplomasi pertahanan Indonesia, apakah sudah sesuai secara konsep maupun implikasinya sehingga menurunnya kembali hubungan Indonesia-Australia dapat diketahui.

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah tersebut, dijabarkan pertanyaan penelitian berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi naik-turunnya hubungan Indonesia-Australia pascakasus penyadapan?
2. Bagaimana bentuk diplomasi pertahanan Indonesia-Australia pascakasus penyadapan?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Menurut *Locke et al.* (2007), tujuan penelitian berarti menunjukkan mengapa ingin melakukan penelitian dan apa yang dicapai. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan faktor yang melatarbelakangi naik-turunnya hubungan Indonesia-Australia pascakasus penyadapan.
2. Menganalisis bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia pascakasus penyadapan.

Penelitian ini akan menjawab faktor yang melatarbelakangi naik-turunnya hubungan Indonesia-Australia serta menjawab bentuk diplomasi pertahanan yang diterapkan antara Indonesia dan Australia pascakasus penyadapan.

Signifikansi yang didapatkan adalah mengetahui faktor naik-turunnya hubungan Indonesia-Australia dan bentuk diplomasi pertahanan sehingga bermanfaat bagi kepentingan Indonesia kedepannya dalam mengolah masalah dengan Australia yang cenderung selalu mengalami kedinamisan. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan politik Negara dan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap permasalahan yang menyangkut hubungan dengan Australia pada khususnya dan antarnegara pada umumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian dari penelitian (*Sugiyono*, 2016). Manfaat penelitian mempunyai dua hal yakni mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoretis), dan membantu mengatasi memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan manfaat terhadap sumbangan pemikiran dari analisis masalah yang sering terjadi antara Indonesia dan Australia. Selain itu, penelitian ini mampu menunjukkan bentuk diplomasi pertahanan yang diimplementasikan oleh instansi pertahanan yang terkait seperti

Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori hubungan internasional dan konsep diplomasi pertahanan yang dapat bermanfaat dalam menyumbangkan pemikiran tentang diplomasi pertahanan Indonesia dan Australia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil akhir penelitian ini adalah analisis faktor yang melatarbelangi naik-turunnya hubungan Indonesia-Australia serta analisis bentuk diplomasi pertahanan Indonesia-australia pascakasus penyadapan. Oleh karena itu, secara praktis, penelitian ini sangat bermanfaat pada instansi atau lembaga pertahanan Indonesia maupun Australia, seperti Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, BIN, dll. Penelitian ini bisa dijadikan acuan terhadap permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

Manfaat lain yang didapatkan adalah bentuk evaluasi kebijakan negara dalam menanggapi masalah dengan Australia. Selain itu, analisis konsep bentuk diplomasi pertahanan Indonesia-Australia pascakasus penyadapan memberikan evaluasi kerja sama yang bisa dipertahankan, dilanjutkan, dihentikan, atau dikembangkan dalam diplomasi pertahanan kedepannya.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini mencakup tentang diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia dan Australia pascakasus penyadapan yang sempat memanas di tahun 2013. Untuk lebih fokus terhadap objek yang diteliti, penelitian ini hanya dibatasi dalam bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam perbaikan hubungan Indonesia-Australia tahun 2013—2016.

Melihat dari gap permasalahan yang ada, bisa dilihat bagaimana hubungan keilmuan konsep diplomasi pertahanan dengan penerapannya yang dilakukan stakeholder terkait seperti Kemhan dan Mabes TNI dalam melakukan deskalasi tensi hubungan kedua negara. Hasil penelitian ini

akan melihat sinkronisasi antara sebuah teori dengan praktik diplomasi pertahanan. Kasus penyadapan ini memang penting untuk diteliti, di mana Indonesia dan Australia merupakan negara yang memiliki hubungan yang erat meskipun dinamikanya sering mengalami naik dan turun.

Untuk mempermudah melihat gambaran besar penelitian, maka peneliti akan menggambarkan desain penelitian singkat mengenai isi penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang didapatkan berasal dari hasil wawancara dan analisis studi literatur. Kemudian, dilakukan analisis data menggunakan metode triangulasi data sampai jenuh hingga didapatkan data yang valid.

Bab 1 Pendahuluan; terdiri dari lima subbab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran; terdiri dari sub-subbab tinjauan pustaka yang berisi teori-teori dan konsep-konsep yang mendukung penelitian ini secara menyeluruh seperti teori realisme, konstruktivisme, komunikasi internasional, konsep diplomasi pertahanan. Teori-teori dan konsep tersebut menjadi dasar acuan dalam melakukan analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

Bab 3 Metode Penelitian; berisi tujuh subbab yaitu desain penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian (instrument, data primer, data sekunder, pengujian keabsahan dan keterandalan data), serta jadwal penelitian

Bab 4 Analisis Data dan Pembahasan; terdiri dari tiga subbab: gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan. Pada sub gambaran umum penelitian, peneliti berfokus melihat bagaimana hubungan Indonesia dan Australia pascakasus penyadapan yang selalu mengalami kondisi naik dan turun sehingga bagaimana peran diplomasi pertahanan mampu bekerja dalam konflik yang terjadi didalamnya. Pada bab ini akan dijelaskan pula kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespon kasus

penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Pada subbab analisis data, dilakukan analisis data kualitatif baik yang bersumber dari data primer yang didapatkan dari wawancara langsung dengan narasumber terkait dan studi literatur dari beberapa sumber buku, jurnal, website, peraturan, dan lain sebagainya. Kemudian pada subbab pembahasan dijabarkan hasil analisis menggunakan kaca mata teori yang dijelaskan pada bab 2 dimana penelitian ini menggunakan pisau analisis dari teori realism, konstruktifisme, komunikasi internasional, dan konsep diplomasi pertahanan. Analisis menggunakan teori yang dipakai mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab 1.

Bab 5 Kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan akan dijabarkan kesimpulan dari jawaban yang didapat berdasarkan rumusan masalah penelitian. Sedangkan pada sub bab saran akan diberikan saran berupa saran teoretis dan praktis untuk kepentingan penelitian yang lebih baik kedepannya.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.